



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 26 Juli 2021

Halaman: 11

TAJUK RENCANA

Setelah PKL Malioboro Menjerit

SELAMA dua minggu pemberlakuan PPKM Darurat tidak hanya membuat pelbagai kota seperti Yogyakarta, lengang. Kondisi ini juga membawa dampak menurunnya daya beli masyarakat. Tak heran jika pemilik usaha sektor retail, transportasi dan pariwisata terus berteriak, meminta perhatian. Peraturan yang dibuat pun kadangkala tidak realistis. Seperti hotel diminta buka, namun akses jalannya ditutup. (KR, 25/7).

Sangat memungkinkan, yang pailit akan meningkat. Hantaman ini tentu bisa memunculkan problema dan bisa berakhir dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Bisa dikatakan, pandemi Covid-10 tidak hanya memporandakan kesehatan namun ekonomi warga tidak kalah hancur.

Realita kian memilukan bagi *wong cilik*. Mereka yang menggantungkan hidup di Malioboro pun berteriak. Sedikitnya, nasib 3.000 PKL Malioboro di ujung tanduk (KR, 23/7). Para pedagang kecil yang selama ini hanya bisa menikmati trotoar (*emperan*) Malioboro, hidupnya semakin pahit. Selama satu setengah tahun paling tidak, kehidupan mereka terhimpit. Pandemi berakibat sedikitnya wisatawan berkunjung ke Yogyakarta, adalah tragedi tak pernah terbayangkan.

Kita semua memahami pedagang kaki lima (PKL) Malioboro tidak sekadar ciri khas yang menjadi icon Yogyakarta. Bisa dikatakan, PKL Malioboro dan Kota Yogyakarta *bak* dua sisi mata uang. Yogyakarta tanpa PKL Malioboro *bak* sayur tanpa garam, hambar. Disebut Malioboro dengan PKL-nya namun digelar di tempat lain, auranya tentu berbeda. Tapi kini nasib mereka di ujung tanduk.

Ini tidak cukup hanya diprihatinkan. Muhammadiyah pernah menggunakan istilah *eRobohnya* Kedai Kamii *fi* istilah diadaptasi dari *eRobohnya* Surau. Kamii karya sastra AA Navis (1956) –

ketika perekonomian rakyat kecil terseok gempuran importasi dan konglomerasi. Diharap, jangan sampai situasi saat ini menjadi bencana yang akan membuat *eRobohnya* PKL Malioboro.

Jangan sampai terjadi. Meski demikian, ketaatan akan ketentuan selama pandemi, memang harus diikuti. Artinya, eksistensi PKL Malioboro tentu saja tetap dengan ketentuan aturan serta ketertiban yang ada. Semua harus menjaga. Jangan sampai kasus di DIY tidak bisa dikendalikan dan melonjak lagi, ketika PPKM dilonggarkan. Jika sampai PPKM kembali terus diperpanjang, akan membuat masyarakat dan pelaku ekonomi kolaps. Ini tidak boleh terjadi. (KR, 24/7)

Maka negara harus hadir. Harus ada dukungan pemerintah. Negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Yogya *fi* Pemerintah DIY cukup berkepentingan hadir dan menjaga agar PKL Malioboro terjaga keberadaannya. Sebab PKL Malioboro ibaratnya ruh Kota Yogya. Kota Yogya dengan Malioboronya menjadi hidup karena keberadaan PKL-nya.

Bukan hanya dengan bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial, hibah dana keistimewaan atau apa pun namanya, bantuan untuk mereka. Pelajaran selama satu setengah tahun pandemi dan memunculkan fenomena wisata virtual, juga harus diantisipasi.

Yogya punya keistimewaan, segudang predikat dengan alamnya *mem-persona*. Ini adalah daya tarik orang datang berwisata. Namun tetap perlu ada pemberdayaan, pelatihan keterampilan sebagai modal sosial sekaligus penguatan paguyuban termasuk koperasi yang ada, bagi pendukung sektor pariwisata termasuk PKL-nya. Dunia dan dinamikanya, membuat kompetisi pasar juga berubah. Mereka harus siap menghadapi dan bisa beradaptasi. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005